



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang
Disebabkan Aneksasi Krimea**

Skripsi

Oleh

Denny Afiyanto

2012330120

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang
Disebabkan Aneksasi Krimea**

Skripsi

Oleh

Denny Afiyanto

2012330120

Pembimbing

Dr. A. Irawan J. Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Denny Afianto
Nomor Pokok : 2012330120
Judul : Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang Disebabkan
Aneksasi Krimea

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 11 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

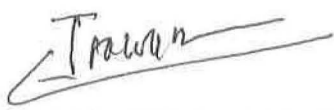
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt K. Pakpahan, SIP., M.A.

: 


Sekretaris

Dr. A. Irawan J. H., Drs., M.A.

: 

Anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denny Afiyanto

NPM : 2012330120

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang Disebabkan Aneksasi Krimea

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis seusasi dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



(Denny Afiyanto)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul:

Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang Disebabkan Aneksasi Krimea.

Pada penelitian ini, penulis memberikan deskripsi mengenai upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademik yang harus dipenuhi dalam menempuh Program Strata-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat baik dalam masa perkuliahan penulis hingga pada masa proses penulisan penelitian ini. Akhir kata penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karunia dan kekuatan yang diberikan dalam seluruh hidup saya khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua, kepada orang tua-ku Afiyanto dan Yayuk yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan studi di Bandung. Terima kasih atas segala daya dan upaya dalam membiayai dan memberikan perhatian semoga segala hasil yang dilakukan saya selama kuliah di Bandung dapat memberikan

pelajaran terhadap saya dan membanggakan papa mama. Tak luput pula kedua kakak, Kezia Puspita Sari dan Della Mayasari, terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang telah diberikan pada masa perkuliahan. Ketiga, kepada Dr.A. Irawan J. Hartono. Terima kasih atas bimbingan dan segala nasihat yang telah diberikan dalam proses bimbingan penyusunan skripsi. Selanjutnya kepada, Nadya Adriane Pattiasina, terima kasih atas segala omelan, nasihat, semangat. Terima kasih ya Nad sudah menjadi sahabat di akhir-akhir masa perkuliahan. Kepada Rangga Adhana, sahabat dalam suka maupun duka, kelebihan dan kekurangan, dari gedung 10 lantai 3 sampai Gili Trawangan, dari Public sampai Sama-Sama. Kepada Felicia Tjandra dan Michael Abednego, sahabat ekspedisi karst Matarombeo yang selama telah memberikan pengalaman tak terlupakan selama rapat, latihan hingga eksplorasi di dalam tanah Matarombeo. Keluarga besar Mahitala khususnya Angkatan Raga Senja, kalian membuat penulis percaya bahwa keluarga pun bisa dipilih. Terima kasih kepada teman-teman di Hubungan Internasional, Stephen, Kenzi, Ello, Benny, Timmy.

Bandung, 15 Januari 2017

Penulis,

Denny Afiyanto

ABSTRAK

Nama : Denny Afiyanto
NPM : 2012330120
Judul : Upaya Rusia Mengatasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa yang Disebabkan Aneksasi Krimea

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan oleh Aneksasi Krimea. Sebagai aktor yang mempunyai hubungan ekonomi yang sangat dekat dengan Uni Eropa maka dampak yang diakibatkan oleh sanksi ekonomi akan sangat terasa bagi Rusia. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea?”

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan dua buah teori dan dua buah konsep. Teori pluralisme sebagai contoh kontribusi aktor-aktor non-negara dalam permasalahan dunia tidak hanya dalam bidang keamanan namun juga bidang ekonomi. Teori Merkantilisme sebagai contoh peran negara dalam melakukan ekonomi internasional. Konsep aneksasi membantu mendeskripsikan tindakan yang dilakukan Rusia terhadap Krimea dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan mengenai kepentingan Uni Eropa dan Rusia dalam menanggapi aneksasi Krimea.

Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa dilakukan melalui perubahan kebijakan ekonomi domestik dan ekonomi luar negeri. Upaya kebijakan ekonomi domestik dilakukan melalui tiga hal yaitu, substitusi impor, perubahan kebijakan moneter, perubahan kebijakan fiskal. Sedangkan upaya dalam kebijakan ekonomi luar dilakukan dengan melakukan reorientasi perdagangan.

ABSTRACT

Name : Denny Afiyanto

Student ID: 2012330120

Title : Russia's Efforts to Overcome European Union's Economic Sanctions Caused by the Annexation of Crimea

This research aimed to describe the Russian efforts to overcome European Union's economic sanctions caused by the annexation of the Crimea. As an actor who has very close economic ties with the EU, the impact caused by the economic sanctions will be felt for Russia. Therefore, this study takes the following research question "How Russia's efforts to overcome the European Union's economic sanctions due to the annexation of the Crimea?"

In answering the research question, the author uses a theory and two concepts. The theory of pluralism as an example of the contribution of non-state actors in the world's problems are not only in the field of security but also the economy. Mercantilism theory explain the role of state in international economic. The concept of annexation to describe actions by Russia of the Crimea and the concept of national interest to describe the interests of the EU and Russia in response to the annexation of the Crimea.

Through this study, the authors found that Russia's efforts to overcome the European Union economic sanctions is done through changes in domestic economic policy and foreign economic policy. Efforts to domestic economic policy carried out through three things; imports substitution, changes in monetary policy, fiscal policy changes. While efforts in the foreign economic policy conducted by reorienting its trade.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iii
Abstrack.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
PERKEMBANGAN KONFLIK KRIMEA	23
2.1 Sejarah dan Profil Krimea.....	23
2.2 Sejarah dan Profil Uni Eropa	29
2.3 Profil Rusia	35
2.4 Alur Konflik Krimea.....	37
2.4.1 Krisis Kiev	37

2.4.2 Aneksasi Krimea oleh Rusia.....	43
BAB III	54
PENJATUHAN SANKSI SEBAGAI RESPON ANEKSASI KRIMEA.....	54
3.1 Sanksi terhadap Rusia.....	54
3.2 Sanksi Ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia.....	55
3.2.1 Sanksi Pembekuan Aset dan Pelarangan Berpergian.....	59
3.2.2 Sanksi Pelarangan Ekspor Impor dalam wilayah Krimea dan Sevastopol	65
3.2.3 Sanksi terhadap Sektor Kerjasama Rusia	68
BAB IV	71
UPAYA RUSIA MENGATASI SANKSI EKONOMI UNI EROPA YANG DISEBABKAN ANEKSASI KRIMEA	71
4.1 Situasi Perekonomian Rusia Setelah Berlakunya Sanksi.....	71
4.1.1 Penurunan Investasi Asing terhadap Rusia.....	75
4.1.2 Peningkatan Inflasi dan Depresiasi Rubel	77
4.1.3 Terputusnya Kerja Sama dan Teknologi Eksplorasi pada Sektor Energi Rusia.....	79
4.2 Perubahan Kebijakan Domestik Ekonomi Rusia.....	81
4.2.1 Kebijakan Fiskal	81
4.2.2 Kebijakan Moneter.....	86
4.2.3 Substitusi Impor.....	89
4.3 Perubahan pada Ekonomi Eksternal Rusia	93
4.3.1 Keluarnya Rusia dari ‘The Group of Eight’ (G8).....	93
4.3.2 Reorientasi Perdagangan Rusia.....	95
4.3.3 Embargo Makanan Rusia terhadap Uni Eropa.....	98
BAB V	103
KESIMPULAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Timeline sanksi ekonomi terhadap Rusia.....57

Tabel 4.2.3 Anggaran Pemerintah Rusia pada tahun 2014-2015; per persen dari GDP.....81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Wilayah Krimea.....	26
Gambar 2.2. Peta Kawasan Uni Eropa.....	30
Gambar 2.3 Peta Wilayah Rusia.....	35
Gambar 4.3.3 Pemusnahan Keju Impor oleh Rusia.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krimea merupakan daerah otonom yang memiliki parlemen tersendiri, namun secara fisik dan politik, Krimea masuk ke dalam wilayah Ukraina. Sejarah mencatat bahwa sebelum tahun 1954, Krimea merupakan bagian dari Uni Soviet, dan pemimpin Uni Soviet pada saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Krimea sebagai hadiah kepada Ukraina.¹ Wilayah Krimea diduduki oleh 3 etnis utama, yaitu Rusia (59%), Ukraina (20%), Tatar Krimea (15%), dan etnis lainnya (6%).²

Secara etnis, Krimea adalah satu-satunya daerah di Ukraina dengan mayoritas penduduk terbesar adalah orang-orang Rusia. Komposisi penggunaan bahasa sehari-hari secara kultural menggunakan kultur Rusia, bahkan dalam hal administrasi, Krimea masih menggunakan bahasa Rusia pada dokumen-dokumennya, meskipun faktanya satu-satunya bahasa resmi di Ukraina adalah bahasa Ukraina. Secara historis, apabila dilihat dari sudut pandang Rusia, Krimea adalah bagian dari Rusia sampai saat Khrushchev, etnis Rusia dan mantan pemimpin Ukraina, memindahkannya ke

¹ Edward Allworth, *The Tatars of Crimea: Return to the Homeland: Studies and Documents*, Duke University Press, 1998, hlm.5-7

²Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea, May 16-30 2013, diakses melalui <http://www.iri.org/sites/default/files/2013%20October%207%20Survey%20of%20Crimean%20Public%20Opinion,%20May%2016-30,%202013.pdf> pada tanggal 11 Juni 2016.

Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1954. Krimea adalah pangkalan untuk BSF dan daerah Sevastopol masih dianggap sebagai “Kota Kejayaan Rusia”.³

Pada tahun 2013, Krimea menjadi suatu wilayah konflik antara Ukraina dan Rusia. Konflik Krimea bermula ketika Presiden Ukraina, yaitu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Ukraina lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas Rusia untuk Ukraina sebesar 30 persen. Keputusan Yanukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat pro Ukraina Barat yang berlangsung di Kiev dan terus berlanjut sampai tahun 2014. Protes yang terjadi di Kiev tersebut pun berubah menjadi protes kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya 77 demonstran dan 600 orang mengalami luka-luka.⁴

Pergolakan politik yang menghadapkan warga sipil dengan pemerintah di Ukraina semakin diperparah dengan adanya isu keterlibatan Rusia dalam *secessionism*⁵ di Krimea. Rusia menolak adanya otoritas baru dalam pemerintahan Ukraina setelah Presiden Yanukovich melarikan diri dari Ukraina.⁶ Pada Maret 2014,

³Paul Robert Magocsi, *A History of Ukraine*. University of Toronto Press, London: 1986, hlm.65.

⁴House of Commons, *Ukraine, Crimea, and Russia*, Research Paper, 2014, hlm.3.

⁵*secessionism* merupakan gerakan untuk memisahkan suatu wilayah/daerah dari suatu kekuasaan negara dan berusaha untuk mendeklarasikan dirinya sendiri dari pemerintahan yang sedang berkuasa yang berpotensi menimbulkan konflik.

⁶Tadeusz Iwanski dkk. “*Russian Policy Towards Ukraine: Not just Crimea*”, (OSW, Centre for Asian Studies, 24/3/2012). Diakses melalui <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-12/russian-policy-towards-ukraine-not-just-crimea> pada 10 Juni 2016.

Republik Otoritas Krimea memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dan bergabung dengan Rusia. Keputusan tersebut dinilai tidak terlepas dari campur tangan Rusia. Hal ini terbukti ketika Rusia menolak untuk menerima tawaran dari Barat agar dapat menyelesaikan konflik di Ukraina bersama-sama. Klaim bahwa Rusia memiliki keterlibatan dalam *secessionism* semakin diyakinkan dengan munculnya pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov Sergey Victorovich, pada tanggal 11 Maret 2014 menyatakan bahwa referendum yang dilaksanakan oleh Krimea untuk memutuskan bergabung bersama Rusia merupakan sesuatu yang legal dan valid. Pemerintah Rusia mengakui sepenuhnya hasil referendum dan deklarasi kemerdekaan Krimea meski otoritas Ukraina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa tidak mengakui hasil referendum dan deklarasi kemerdekaan tersebut.⁷

Langkah Rusia untuk mendukung referendum Krimea, didukung dengan tindakan pemerintah Rusia yang mulai menduduki fasilitas-fasilitas strategis di Krimea. Rusia mengirimkan pasukan militernya dengan senjata lengkap di Bandar Udara Simferopol dan bandar udara militer Sevastopol. Selain bandar udara, pasukan militer Rusia juga menduduki kantor pusat dari “Krym”, yaitu perusahaan televisi dan komunikasi yang dimiliki oleh Urktelecom yang bertanggungjawab atas sebagian besar koneksi telepon dan komunikasi di Krimea.⁸ Pemerintah Rusia juga

⁷*Ibid.*

⁸CSIS, “The Ukraine Crisis Timeline: Russian Forces Occupy Strategic Facilities in Crimea”, csis.org, diakses melalui <http://ukraine.csis.org/crimea.htm#3> pada 10 Juni 2016

menyediakan paspor sebagai warga negara Rusia kepada masyarakat asing yang menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-hari seperti masyarakat yang tinggal di Krimea, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa mayoritas penduduk Krimea menggunakan bahasa Rusia.⁹ Hal tersebut semakin menekan pemerintah Ukraina dan pihak Barat serta meningkatkan ketegangan internal di Ukraina.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah berkali-kali mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap puluhan warga Rusia dan Ukraina yang mendukung gerakan separatis dalam krisis di Ukraina, namun Rusia justru menganggap bahwa ancaman sanksi-sanksi tersebut hanya bersifat simbolis dan membuktikan bahwa Amerika Serikat serta Uni Eropa tidak serius dalam merespon Rusia. Respon Amerika Serikat dan Uni Eropa bertolak belakang dengan respon Jerman, negara yang merupakan negara berpengaruh di Uni Eropa tersebut lebih mengutamakan proses negosiasi dibandingkan memberi respon yang keras terhadap Rusia. Hal ini dikarenakan pemerintah Jerman percaya bahwa stabilitas Eropa hanya dapat dicapai bersama Rusia.¹⁰ Jerman juga menolak usulan Amerika Serikat untuk menjatuhkan restriksi visa, larangan perjalanan menuju Rusia, sanksi perdagangan,

⁹Adrian Blomfield, "Russia distributing passports in the Crimea", *The Telegraph*, 17 Agustus 2008 diakses melalui <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/2575421/Russia-distributing-passports-in-the-Crimea.html> pada tanggal 10 Juni 2016

¹⁰Stefan Meister, *Reframing Germany's Russia Policy – An Opportunity for the EU*, (European on Foreign Relations, 2014), hlm.2

pembekuan aset keuangan, serta embargo minyak terhadap Rusia karena adanya kekhawatiran dampak buruk pada sektor energi serta industri.¹¹

Uni Eropa dan Rusia merupakan partner perdagangan dengan komoditas perdagangan yang sangat besar. Langkah-langkah yang diambil Rusia dan Uni Eropa dalam krisis Krimea akan mempengaruhi hubungan kedua negara, baik dalam politik, sosial, budaya, dan juga perekonomian. Uni Eropa mengambil langkah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dengan tujuan untuk mengubah sikap Rusia terhadap Krimea dan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina. Tindakan Rusia untuk mendukung referendum Ukraina akan menimbulkan pengaruh terhadap hubungan politik maupun ekonomi antara Rusia – Ukraina maupun antara Rusia dan negara-negara yang menentang tindakan Rusia dalam mendukung kemerdekaan Krimea. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mendeskripsikan upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea. .

1.2 Identifikasi Masalah

Referendum Krimea pada tanggal 16 Maret 2014 berakhir dengan 96.7% rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Dua hari setelah

¹¹Ian Traynor, “*Ukraine Crisis: any EU sanctions are unlikely to make impression on Putin*”, The Guardian, diakses melalui <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-crimea-crisis-eu-sanctions-impressions-putin> pada 10 Juni 2016

dilakukannya referendum, pemerintah Rusia resmi menandatangani undang-undang yang memasukkan wilayah semenanjung Krimea sebagai wilayah dari Federasi Rusia.¹² Aneksasi yang berawal dari konflik internal Ukraina tersebut telah melanggar berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani Rusia. Dewan Keamanan PBB telah melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea pada 16 Maret 2014 adalah ilegal, namun resolusi tersebut gagal setelah Rusia menggunakan hak vetonya untuk memveto resolusi tersebut.¹³

Kecaman komunitas internasional masih terus berlanjut, dimana pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi terkait ilegalitas referendum Krimea dimana resolusi tersebut disetujui 100 negara, 58 negara menyatakan abstain, dan 11 negara menolak serta 24 negara tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Rusia tersebut adalah ilegal.¹⁴

Tindakan aneksasi terhadap Krimea telah membuat Uni Eropa dan negara-negara Barat merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk mengubah kebijakan Rusia tersebut. Rusia adalah salah satu negara *great power* dalam arti memiliki

¹²BBC, "Ukraine crisis: Timeline", *BBC News*, 9 September 2014 diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275> pada tanggal 10 Juni 2016.

¹³Edward Lucas dan Wess Mitchell, Central European Security After Crimea: The Case for Strengthening NATO's Eastern Defenses. *Center for European Policy Analysis*. Washington DC, No.35, 2014, hlm.1

¹⁴Christian Marxsen, "The Crimea Crisis – An International Law Perspective", *Heidelberg Journal of International Law*, 74/2, 2014. diakses melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520530 pada tanggal 10 Juni 2016

kapabilitas militer yang termasuk kuat di dunia. Disamping merupakan negara nuklir terbesar, Rusia memiliki posisi politik yang sangat kuat karena merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Rusia juga merupakan partner politik dan juga ekonomi yang besar bagi Uni Eropa. Hal ini membuat Uni Eropa merespon dengan sangat hati-hati atas aneksasi yang dilakukan oleh Rusia.

Upaya awal yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah melakukan isolasi diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Upaya diplomasi ini dilakukan sebagai langkah awal Uni Eropa untuk memberikan peringatan terhadap Rusia atas tindakan aneksasi yang dilakukan terhadap Krimea. Uni Eropa memperingatkan bahwa apabila Rusia tidak mengubah kebijakannya terhadap Krimea, maka Uni Eropa siap untuk meningkatkan sanksi tersebut menjadi sanksi ekonomi yang lebih berat apabila Putin melakukan intervensi yang lebih luas ke wilayah Ukraina Timur.¹⁵

Rusia tetap pada kebijakannya untuk mendukung referendum Krimea, para pemimpin kelompok negara maju (G8) sepakat untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan sampai Presiden Putin mengubah kebijakannya terhadap Krimea. Selanjutnya, G7 mengadakan pertemuan musim panas di Brussel, dan secara

¹⁵Ali Muhammad, "Selamat Datang Pedang Dingin!": Kepentingan Rusia di Krimea dan Ukraina Timur dan Ketegangan Hubungan dengan Barat", *Insigna Journal of International Relations*, Vol.2, No.2, November 2015, hlm.8

simbolis bertemu di Markas Uni Eropa dan NATO, dua organisasi yang sedang memperkuat hubungan dengan Ukraina.

Setelah mengeluarkan Rusia dari G8 dan membatalkan *EU-Russia Summit* yang dilakukan sebagai upaya diplomasi untuk meredam krisis Krimea, Uni Eropa mengenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi pejabat pemerintahan Rusia yang terkait dengan krisis Krimea, Rusia tetap melakukan tindakan aneksasi ilegal terhadap Krimea, hingga pada akhirnya Uni Eropa dan AS memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia.¹⁶

Uni Eropa merespon aneksasi ilegal Rusia terhadap Krimea dengan berbagai upaya, yakni melalui upaya diplomasi, pencegahan dan pembatasan terhadap beberapa pejabat pemerintahan Rusia, upaya pembatasan terhadap Krimea dan Sevastopol, dan juga sanksi ekonomi.¹⁷ Pemberian sanksi terhadap Rusia dilakukan dengan tujuan untuk mengubah sikap politik Rusia dengan cara menargetkan sanksi terhadap sektor-sektor yang esensial bagi perekonomian Rusia.¹⁸ Untuk memberikan tekanan kepada Rusia, Uni Eropa membatasi bank-bank yang dimiliki oleh warga Rusia untuk meningkatkan kreditnya di pasar saham, selain itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi pelarangan ekspor senjata dan *dual-use goods* atau barang yang

¹⁶European Union, "EU Sanctions against Russia over Ukraine crisis", www.europa.eu, diakses melalui https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 14:51 WIB.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Susanne Oxenstierna dan Per Olsson, *The Economic Sanctions against Russia: Impact and Prospects of Success*, Swedia: Swedish Defence Agency, 2015, hlm.9

dapat digunakan militer maupun masyarakat sipil, Uni Eropa juga melarang ekspor untuk peralatan eksplorasi minyak.¹⁹

UE menjatuhkan 3 rezim sanksi yang berbeda terhadap Rusia. Ketiga target rezim tersebut antara lain:

- a. Individu dan badan hukum yang terkait dengan tindakan mengancam dan meruntuhkan integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina yang memiliki aset di wilayah UE akan dibekukan.
- b. Pelarangan impor ke wilayah UE khusus barang-barang yang berasal dari Krimea atau Sevastopol sebagai respon dari tindakan aneksasi ilegal atas Krimea dan Sevastopol.
- c. Sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan melarang masuknya Rusia ke pasar UE, dan melarang ekspor senjata, *dual-goods* dan jasa industri minyak.

Ketiga rezim sanksi tersebut dijatuhkan Uni Eropa dengan tujuan untuk menekan aneksasi yang dilakukan Rusia dan membuat Rusia untuk mundur dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Sanksi-sanksi yang telah telah dijatuhkan, baik terhadap Rusia maupun Uni Eropa, telah memberikan pengaruh dalam bidang politik maupun ekonomi terhadap kedua entitas tersebut. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

¹⁹*Ibid.*

dijelaskan, dalam skripsi ini peneliti akan lebih membahas terhadap upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan mengarah kepada analisa upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea. Rentang waktu penelitian ini terbatas pada tahun 2012-2016, rentang waktu tersebut diambil oleh penulis dengan alasan bahwa penulis membahas perekonomian Rusia sebelum terjadinya aneksasi yakni dari tahun 2012. Aneksasi sendiri terjadi pada tahun 2014, sehingga untuk mengetahui dampak dari aneksasi tersebut penulis memutuskan rentang waktu diakhiri pada tahun 2016. Uni Eropa sendiri akan dideskripsikan oleh penulis secara general, mengingat terdapat 28 anggota negara dari Uni Eropa, sehingga penulis menghindari pembahasan yang terlalu meluas.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang terjadinya aneksasi Krimea dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merujuk ke dalam suatu pertanyaan penelitian, yaitu:

“Bagaimana upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea dengan pendekatan terhadap upaya substitusi impor, kebijakan moneter dan fiskal, serta reorientasi perdagangan Rusia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti diantaranya:

1. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengaplikasikan konsep dan teori Hubungan Internasional, terlebih pemahaman mengenai bagaimana hubungan politik antara negara dan organisasi internasional dapat mempengaruhi hubungan perekonomian dari kedua entitas tersebut.
2. Bagi para peminat studi tentang perekonomian internasional khususnya mengenai hubungan ekonomi antara Rusia dan Uni Eropa. Besar harapan penulis agar penelitian ini agar dipertimbangkan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran maupun penelitian yang lebih lanjut.

1.4 Kajian Literatur

Literatur pertama adalah sebuah *research paper* yang dikeluarkan oleh The Bow Group yang berjudul “*The Sanctions on Russia*”.²⁰ Paper ini menjelaskan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya terhadap Rusia terkait dengan Krisis Krimea. Perbedaan literatur ini dengan penelitian penulis adalah literatur ini hanya membahas sanksi tanpa melihat bagaimana pengaruh sanksi tersebut terhadap hubungan Rusia dengan negara-negara yang memberikan sanksi. Literatur ini membantu penulis dalam memahami sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia untuk kemudian penulis tambahkan dengan penelitian baru yakni tentang bagaimana upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea.

Literatur yang kedua merupakan sebuah jurnal berjudul “*Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict*” yang ditulis oleh Anton Bebler. Dalam jurnal ini Anton Bebler memberikan penjelasan akan kondisi politik di Krimea yang dulunya dikuasai oleh Ottoman dan direbut oleh Rusia hingga menjadi bagian dari Ukraina setelah pecahnya Uni Soviet. Penjelasan juga berlanjut hingga terjadinya aneksasi Krimea oleh Rusia yang menimbulkan ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina hingga melibatkan pasukan bersenjata dalam pergulatannya. Konflik ini juga mengakibatkan

²⁰The Bow Group, “The Sanctions on Russia,” UK, 2015.

terlibatnya aktor-aktor internasional seperti Uni Eropa, NATO, USCE, PBB dalam penyelesaian konflik.

Literatur ketiga adalah buku Daniel W. Denzer, *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*. Buku ini menjelaskan paradoks dari suatu sanksi ekonomi dan memberikan perbandingan dari sanksi-sanksi ekonomi yang pernah terjadi dengan dasar studi kasus yakni sanksi ekonomi terhadap Irak yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Buku ini melihat bagaimana suatu sanksi ekonomi lebih berdampak terhadap aliansi atau sekutu-sekutu dari negara yang mengenakan sanksi dibandingkan dengan negara tersebut. Buku ini membantu penulis dalam meneliti bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia berdampak terhadap negara-negara sekutu Uni Eropa secara keseluruhan.

Literatur keempat adalah artikel jurnal karya Christian Marxen yang berjudul *The Crimea Crisis*, artikel jurnal ini menjelaskan eskalasi dari krisis Krimea. Artikel jurnal ini melihat aneksasi Rusia terhadap Krimea dari perspektif hukum internasional, yaitu tentang kewajiban dari Rusia dan Ukraina, prinsip *self-determination*, dan situasi hukum setelah Krimea memutuskan untuk menjadi bagian dari Rusia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Negara memang merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun terdapat aktor lain yang memiliki peran besar dalam hubungan internasional,

yakni organisasi internasional. Untuk mendeskripsikan hal ini, penulis berangkat dari Liberalisme Sosiologis dalam buku *Introduction to International Relations: Theories & Approaches* karya Robert Jackson dan Georg Sorensen, Liberalisme Sosiologis melihat hubungan internasional tidak hanya mengenai hubungan antar negara, tetapi juga mengenai hubungan transnasional. Hubungan transnasional disini mencakup hubungan antar masyarakat, grup, maupun organisasi yang berada di berbagai negara.²¹ Menurut Rosenau, definisi hubungan transnasional adalah sebuah proses dimana hubungan internasional dilaksanakan oleh negara yang dilengkapi oleh hubungan antara individu, grup, dan masyarakat sehingga dapat dan memiliki konsekuensi penting dalam suatu masalah.

Pendapat Rosenau diatas juga didukung oleh John Burton yang menggambarkan hubungan transnasional menjadi sebuah ‘cobweb model’. Model ini menunjukkan bahwa negara terdiri atas banyak kelompok berbeda yang memiliki kepentingan berbeda pula. Dengan melihat pola keterkaitan komunikasi dan interaksi yang terjadi antar kelompok tersebut, kita akan memperoleh gambaran akurat dari suatu fenomena yang terjadi di hubungan internasional.²² Hubungan transnasional antar negara dan kelompok ini kemudian menjadi sebuah karakter dari dunia yang

²¹Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to Internasional Relations: Theories & Approaches*, Oxford University Press: New York, 2010 , hlm. 99

²²*Ibid.* hlm.100

pluralis. Gagasan ini yang kemudian membawa kita kepada pemikiran liberalisme lainnya yaitu pluralisme.

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, pluralis berpendapat bahwa aktor non-negara merupakan entitas penting dalam politik dunia.²³ Negara yang sudah tidak bisa lagi menyelesaikan konflik, terutama konflik low-politics, akan digantikan perannya oleh aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Aktor non-negara ini memiliki kepentingan tersendiri yang bisa mengubah kebijakan dari suatu negara.

Pluralis juga berpendapat bahwa dalam politik global negara bukan hanya aktor satu-satunya, tetapi terdiri dari individu dan kelompok yang juga memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Jika kita tetap berfokus pada negara sebagai aktor utama, maka esensi dari politik itu sendiri akan hilang. Karena politik bukan berarti interaksi yang dilakukan di dalam negara saja, tetapi juga dimensi transnasional dari negara dan aktor non-negara yang berkerja melewati batas negara.²⁴

Selanjutnya, pluralis menegaskan bahwa agenda dari politik internasional itu luas. Walaupun perhatian mengenai masalah keamanan nasional merupakan hal yang penting, tetapi pluralis juga memberikan perhatian kepada bidang-bidang selain itu

²³Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and beyond*, edisi ketiga, Needham Heights, Maryland: Allyn & Bacon, 1999, hlm 199.

²⁴*Ibid.* hlm.8

seperti ekonomi, sosial, dan isu ideologi yang muncul dikarenakan adanya saling ketergantungan antar aktor.²⁵ Pendapat pluralis yang mengatakan bahwa negara tidak lagi menjadi satu- satunya aktor utama juga didukung oleh Daphne Jesselin dan William Wallace dalam buku mereka, *Non-State Actors in World Politics*. Definisi pertama dari aktor non-negara adalah mereka terpisah dari pendanaan dan kontrol pemerintah. Kedua, aktor non-negara beroperasi atau berpartisipasi di dalam jaringan lintas batas negara yang bekerja dalam hubungan transnasional dan menghubungkan berbagai sistem politik, ekonomi dan masyarakat. Ketiga, aktor non-negara berperan dalam mempengaruhi hasil politik, baik di dalam negara atau dalam institusi internasional, baik disengaja maupun tidak, baik sebagai tujuan utama mereka atau sebagai aspek dari kegiatan mereka.²⁶

Penulis juga akan menggunakan salah satu teori ekonomi politik internasional yaitu teori merkantilisme. Merkantilisme berpendapat bahwa:²⁷

- a. Negara harus melibatkan diri dalam perdagangan internasional.
- b. Negara dan pasar sebagai sarana untuk mempertahankan keamanan nasional.
- c. *Self sufficiency*

²⁵ *Ibid.* hlm. 205

²⁶ Daphine Jesselin dan William Wallace, *Non-state Actors in World Politics*, London: Palgrave, 2001, hlm.3-4

²⁷ David Levi-Faur. *Economic Nationalism: from Friedrich List to Robert Reich*. Review of *International Studies* (1997). Hlm. 361-370.

d. Proteksionisme. Menjaga perekonomian domestik dari invasi luar.

Menurut Robert J. Art, kepentingan nasional dapat diurutkan menjadi *vital interest*, *highly important*, dan *important interest*.²⁸ *Vital interest* merupakan kepentingan yang apabila tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerugian dan bencana bagi negara, yang berarti kepentingan untuk melindungi keamanan negara dan untuk memastikan keselamatan negara secara fisik dan kedaulatan politik negara.²⁹ *Highly important interest* merupakan kepentingan yang apabila terpenuhi, akan memberikan keuntungan yang besar bagi suatu negara, dan apabila tidak, akan menimbulkan kerugian namun tidak berdampak signifikan. Terakhir adalah *important interest*, yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi negara dan termasuk keamanan ekonomi yang berkontribusi membuat lingkungan internasional lebih kondusif bagi kepentingan suatu negara.³⁰

Kebijakan moneter didefinisikan sebagai penyesuaian pasokan uang oleh bank sentral untuk menghindari disequilibrium moneter.³¹ Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah upaya untuk mengimbangi perubahan permintaan uang dengan perubahan jumlah yang beredar. Terdapat dua cara dalam mengatur kebijakan moneter yaitu melalui *open market operations* dan *discount rate*. *Open market*

²⁸Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*, United States Cornell University Press, hlm.45

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.* Hlm.46

³¹M. A. Akhtar. *Understanding Open Market Operations*. Federal Reserve Bank of New York (1997). Hlm. 1-14.

operations mengatur jumlah uang beredar dengan menjual dan membeli surat obligasi serta instrumen-instrumen uang lainnya. *Discount rate* mengatur jumlah uang beredar dengan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menggunakan pajak dan pengeluaran negara dalam mempengaruhi ekonomi. Substitusi impor adalah usaha suatu negara untuk melakukan substitusi barang impor dengan barang sejenis oleh industri lokal.³²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep aneksasi yang didefinisikan sebagai transisi politik suatu wilayah dari kekuasaan suatu entitas kepada kekuasaan lainnya atau transisi/perpindahan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada.³³ Sanksi, dalam hubungan internasional didefinisikan sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap suatu negara untuk memaksa negara tersebut agar mematuhi hukum internasional dan memaksa untuk mengubah kebijakannya.³⁴ Sanksi Ekonomi merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara atau kelompok negara yang bertindak secara bersama-sama untuk memperkuat suatu tekanan, sebagai contoh, tekanan moral, diplomatik, dan militer.³⁵ Berdasarkan buku *The Sanctions Paradox*, Drezner berpendapat bahwa dikarenakan penerapan suatu sanksi didasarkan terhadap suatu konflik yang digunakan terhadap lawan dibandingkan

³²Nelson Brian, *A Comprehensive Dictionary of Economics*, Delhi: Abhishek Publications, 2009. Hlm.88

³³Rainer Hofman, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, New York: Oxford University Press, 2013.

³⁴Geoff Simons, *Imposing Economic Sanctions*, London: Pluto Press, 1999, hlm.8

³⁵*Ibid.* Hlm. 5

dengan sekutu, terdapat paradox bahwa sekutu dari negara yang mengenakan sanksi tersebut lebih rentan terhadap tekanan dari lawan dibandingkan dengan negara pemberi sanksi, hal ini dikarenakan negara lawan cenderung menghindari konflik dengan pemerintah yang memberikan sanksi.³⁶ Embargo dalam hubungan internasional digambarkan sebagai larangan peredaran barang-barang ataupun jasa ke negara lain baik melalui darat, laut, atau udara.³⁷

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti topik dan pertanyaan terkait adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pentingnya pemahaman mengenai makna atau *meaning* perilaku manusia dan konteks sosial, politik, dan budaya dimana sebuah interaksi berlangsung. Penelitian kualitatif memandang fenomena sosial secara holistik dan mencari keterlibatan subjek penelitian terkait dalam pengumpulan data serta berusaha untuk membangun hubungan dan kredibilitas subjek dalam penelitian.³⁸ Metode ini bertumpu pada fakta,

³⁶Daniel W. Denzer, *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, United Kingdom: Cambridge University Press, 1999.

³⁷*Ibid.* hlm. 7

³⁸John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition*, California: SAGE Publications, Inc., 2002, Hlm. 20

realitas, dan menjadikan teori sebagai bahan referensi untuk membuktikan bahwa pentingnya penelitian ini dibuat.³⁹Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melibatkan upaya-upaya penting seperti menganalisis data dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.⁴⁰ Peneliti menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dimana adanya pengembangan atas pendalaman dan pemahaman definisi subjek penelitian terhadap dunia.⁴¹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dari studi kasus dalam penelitian ini serta menunjang data-data aktual, penulis menggunakan sumber media elektronik baik berupa media cetak seperti majalah dan koran, maupun media elektronik. Selanjutnya, pengumpulan data dikemas melalui studi literatur yang berisi dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini melalui sumber buku, jurnal, laporan resmi maupun pemberitaan media elektronik melalui *internet*.

³⁹Conny R. Semiawan, *Metode Kualitatif: Jenis Karakter dan Keunggulan*, Grasindo, tahun 2006

⁴⁰John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, California: SAGE Publications, Inc., 2009, Hlm. 4

⁴¹Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (Canada: A. Wiley-Interscience Publication, 1975), hal. 4-5 & 8-9.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi ke dalam 5 bab, dengan Bab I sebagai awal dan dasar penulisan. Penulis akan memaparkan latar belakang masalah masalah, identifikasi maslaah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur yang digunakan untuk penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika dari penelitian.

Bab II akan berisi perkembangan konflik Krimea, yang akan diawali oleh sejarah wilayah Krimea, sejarah dan profil Uni Eropa, profil Rusia, diakhiri penjelasan mengenai alur konflik Krimea.

Bab III akan berisi mengenai sanksi-sanksi yang timbul akibat aneksasi Krimea. Sanksi tersebut adalah sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, *timeline* dari sanksi-sanksi tersebut.

Bab IV akan berisi mengenai upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea. Pembahasan akan diawali dengan pembahasan mengenai dampak dari sanksi Uni Eropa terhadap perekonomian Rusia. Dilanjutkan dengan perubahankebijakan ekonomi domestik Rusia dan ekonomi eksternal Rusia.

Pada bagian akhir dari penulisan ini, yaitu Bab V, merupakan kesimpulan masalah dan penegasan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada pada pokok

permasalahan dan juga sebagai penutup dalam penelitian ini yaitu akan disimpulkan upaya Rusia mengatasi sanksi ekonomi Uni Eropa yang disebabkan aneksasi Krimea.